

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah daratan 47.931,54 km² tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Timur : Negara Republik Demokratik Timor Leste

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota, yang terletak ditujuh pulau besar, yaitu:

- 1) Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.
- 2) Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang.
- 3) Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
- 4) Pulau Alor: Alor
- 5) Pulau Lembata: Lembata
- 6) Pulau Rote: Rote Ndao
- 7) Pulau Sabu: Sabu Rajua

NTT secara astronomis terletak antara 80-20 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61 persen) dan kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini

menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relative kering.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun metodologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2017 adalah 32,320C dan terendah adalah 15,550C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27-280C dengan pengecualian wilayah Manggarai yang memiliki rata-rata suhu 20,130C.

Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi di NTT tahun 2017 adalah antara 900-4.400 mm³. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 218 disusul Manggarai Timur dengan 166 hari hujan dan Ngada dengan 158 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Kabupaten Nagekeo dengan 55 hari hujan disusul Timor Tengah Utara dengan 60 hari hujan dan Kabupaten Kupang dengan 70 hari hujan pada tahun 2017.

4.1.2 Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penduduk Nusa Tenggara Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km².

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu

tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 adalah sebanyak 5.287.302 jiwa yang terdiri atas 2.619.181 laki-laki dan 2.668.121 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2017 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 adalah 1,61 persen. Kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa per km², dimana yang terpadat adalah Kota Kupang dengan 2.289 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 36 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 39 jiwa per km². Sementara itu, jumlah rumah tangga adalah 1,1 juta rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,6.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumba Barat	64,918	60,858	125,776
2	Sumba Timur	129,389	123,315	252,704
3	Kupang	190,480	182,297	372,777
4	Timor Tengah Selatan	228,917	235,063	463,980
5	Timor Tengah Utara	123,384	126,327	249,711
6	Belu	106,782	106,814	213,596
7	Alor	98,916	103,974	202,890
8	Lembata	64,581	73,133	137,714
9	Flores Timur	120,285	131,326	151,611
10	Sikka	150,023	167,269	317,292
11	Ende	128,819	143,265	272,084
12	Ngada	77,701	81,380	159,081
13	Manggarai	161,192	468,006	329,198
14	Rote Ndao	81,380	78,407	159,614
15	Manggarai Barat	130,199	133,008	263,207
16	Sumba Tengah	36,385	34,334	70,719

17	Sumba Barat Daya	170,293	161,601	331,894
18	Nagekoe	69,291	73,513	142,804
19	Manggarai Timur	138,380	141,738	280,118
20	Sabu Raijua	46,814	44,698	91,512
21	Malaka	90,121	96,191	186,312
22	Kota Kupang	211,104	201,604	412,708
	Nusa Tenggara Timur	2,619,181	2,668,121	5,287,302

Sumber data : BPS Provinsi NTT, diolah 2019

Dari Tabel 4.1 Diatas dapat dilihat Kota Kupang mempunyai jumlah penduduk tertinggi untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah laki-laki sebanyak 211,104 Jiwa, jumlah perempuan sebanyak 201,604 dan jumlah seluruh penduduk Kota Kupang adalah 412,708. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai jumlah penduduk terendah untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah laki-laki sebanyak 36,385 Jiwa, Perempuan sebanyak 34,334 Jiwa dan total seluruh penduduk Kabupaten Sumba Tengah 70,719 Jiwa. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur ada tahun 2017 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2,619,181 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2,668,121 Jiwa dan total keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 5,287,302 jiwa.

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, angkatan kerja tahun 2017 berjumlah 2.398.609 orang atau 69,09 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,73 persen berstatus bekerja. Tingkat pengangguran tercatat 3,27. Di NTT, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti oleh sektor jasa. dan perdagangan. Sebanyak 584.090 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2017 pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 3.797 orang yang terdiri atas 1.775 laki-laki dan 2.022 perempuan. Sebanyak 1.614 orang yang terdaftar sudah ditempatkan bekerja.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017

No	Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	1,357,673	1,040,936	2,398,609
	- Bekerja	1,311,351	1,008,710	2,320,061
	-Pengangguran	46,322	32,226	78,548
2	Bukan Angkatan Kerja	339,464	733,783	1,073.247
	- Sekolah	187,589	189,656	377,245
	- Mengurus Rumah Tangga	73,736	488,808	562,544
	- lainnya	78,139	55,319	133,458
TOTAL		1,697,137	1,774,719	3,471,856
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		80,00	58,65	69,09
Tingkat Pengangguran		3,41	3,10	3,27

Sumber data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah 2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebanyak 2,398,609 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1,357,673 jiwa dan perempuan 1,040,936 jiwa, sedangkan yang bekerja sebanyak 2,320,061 jiwa dan yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan sebanyak 78,548 jiwa.

Jumlah bukan angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebesar 1,073,247 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 339,464 jiwa dan perempuan sebanyak 733,783 jiwa dengan rincian yang bersekolah sebanyak 377,245 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 187,589 jiwa dan perempuan sebanyak 189,656 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebesar 562,544 jiwa terdiri dari laki-laki

sebanyak 73,736 jiwa dan perempuan sebanyak 488,808 jiwa dan lainnya sebesar 133,458 jiwa terdiri dari Laki laki sebanyak 78,139 jiwa dan perempuan sebanyak 55,519 jiwa.

4.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 4.3
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2012-2017

No	Tahun	Garis kemiskinan	Penduduk miskin	
			Jumlah	Presentase
1	2012	222,507	998,45	20,41
2	2013	251,080	1006,88	20,24

3	2014	312,328	991,88	19,60
4	2015	307,224	1160,53	22,58
5	2016	327,003	1150,08	22,01
6	2017	346,737	1134,74	21,38

Sumber data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah 2019

Tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 21,38 persen atau sebanyak 1,13 juta orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp.343.396 per kapita per bulan. NTT menduduki peringkat ke-33 nasional dengan nilai IPM 63,73 di tahun 2017, naik 0,60 persen dibandingkan tahun 2016 dengan nilai IPM 63,13. Nilai IPM tertinggi menurut Kabupaten/Kota di NTT adalah Kota Kupang pada peringkat 1, Ngada peringkat 2, dan Ende pada peringkat 3.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	95,4	114,05
2	SMP/MTs	67,16	91,35
3	SMA/SMK/MA	53,32	78,83

Sumber data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah 2019

Angka Partisipasi Murni NTT untuk Jenjang SD sederajat tahun 2017 adalah 95,40, untuk jenjang SMP sederajat adalah 67,16, dan jenjang SMA sederajat adalah 53,32. Angka ini mengikuti trend yang positif dimana setiap tahunannya persentasi sekolah anak NTT meningkat. Berdasarkan Susenas 2017, penduduk NTT usia 10 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 32,91% dengan angka buta huruf mencapai 7,25%. Data ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mengindikasikan peningkatan pendidikan di NTT.

4.1.4 Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu (1 tahun atau triwulan). Sesuai dengan pengertian tersebut maka PDRB suatu wilayah menunjukkan ukuran atau skala perekonomian dari wilayah yang bersangkutan dalam periode pengamatan. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Dalam rangkaian kegiatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, PDRB memiliki peran penting, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Ada dua sistem penilaian yang disajikan dalam publikasi ini yaitu, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun penghitungan. Harga konstan atau harga tetap adalah harga pada tahun tertentu yang diperlakukan sebagai tahun dasar perhitungan. Dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan demikian PDRB atas dasar harga konstan yang disajikan ini adalah:

4.1.4.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB NTT. Pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT (28,89 persen),

kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (12,67 persen); lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,07 persen); lapangan usaha konstruksi (10,81 persen); lapangan usaha jasa pendidikan (9,63 persen); lapangan usaha informasi dan komunikasi (6,98 persen); dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan (5,38 persen). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah lima persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di NTT. Kategori ini mencakup subkategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Jika dirinci per golongan, golongan peternakan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 32,81 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Golongan peternakan mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,88 persen. Pada tahun 2016 semua subkategori pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada kategori ini paling besar dialami oleh subkategori perikanan yaitu sebesar 5,71 persen, kemudian diikuti oleh subkategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 1,77 persen dan subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar 1,54 persen.

Tabel 4.5
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	29,26	28,86	28,41	27,61
2	Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,44	1,47	1,47	1,47
3	Industri Pengolahan	1,27	1,27	1,25	1,25	1,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	10,60	10,58	10,60	10,62	10,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	11,31	11,31	11,43	11,60
8	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,92	4,99	5,01	5,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,58	0,59	0,59	0,65
10	Informasi dan Komunikasi	8,23	8,29	8,49	8,66	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,54	3,75	3,80	3,83	3,95
12	Real Estate	2,68	2,69	2,59	2,56	2,52
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,21	12,44	12,54	12,75	12,81
15	Jasa Pendidikan	8,63	8,72	8,79	8,72	8,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,15	2,12	2,13	2,15
17	Jasa lainnya	2,21	2,18	2,17	2,14	2,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

4.1.4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 bertumbuh lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Timur tahun 2016 mencapai 5,18 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 14,61 persen. Seluruh lapangan usaha yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif (tabel 4.6). Adapun lapangan

usaha-lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,46 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,47 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,46 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,77 persen; lapangan usaha Jasa Informasi dan Komunikasi mencatat sebesar 6,76 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,73 persen; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,19 persen; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,66 persen; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,63 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,98 persen; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,18 persen; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 3,55 persen; lapangan usaha Real Estate sebesar 3,41 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,83 persen; lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,23; dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,38 persen.

Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),
2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	29,26	28,86	28,41	27,61
2	Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,44	1,47	1,47	1,47
3	Industri Pengolahan	1,27	1,27	1,25	1,25	1,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	10,60	10,58	10,60	10,62	10,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	11,31	11,31	11,43	11,60
8	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,92	4,99	5,01	5,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,58	0,59	0,59	0,65
10	Informasi dan Komunikasi	8,23	8,29	8,49	8,66	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,54	3,75	3,80	3,83	3,95
12	Real Estate	2,68	2,69	2,59	2,56	2,52
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,21	12,44	12,54	12,75	12,81
15	Jasa Pendidikan	8,63	8,72	8,79	8,72	8,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,15	2,12	2,13	2,15
17	Jasa lainnya	2,21	2,18	2,17	2,14	2,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016.

4.2 Profil Tempat Penelitian

4.2.1 Profil Badan Pusat Statistik

Penelitian ini di dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti dengan menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU 16 Tahun 1997 antara lain:

- 1) Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya serta mandiri atau bersama dengan BPS.
- 2) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- 3) Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.
- 4) Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- 2) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

- 3) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistic.
- 4) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

4.2.2 Sejarah Berdirinya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Masa Hindia Belanda

Didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen *Lanbout Nijverheid en Handel*. Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoer Voord de Statistiek (CKS)*.

2. Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke Pemerintahan Militer Jepang kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintahan militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama “CHOSASITU GUNSEIKANBU”

3. Masa Pemerintahan RI 1945-1965

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 Choisasitsu Guenseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkat Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946 KAPPURI pindah ke Yogyakarta mengikuti pindahnya Pusat Pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (BELANDA) menghidupkan CKS. Berdasarkan surat edaran Kementrian

Kemakmuran 12 Juni 1950 No.219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” dibawah Kementerian Kemakmuran.

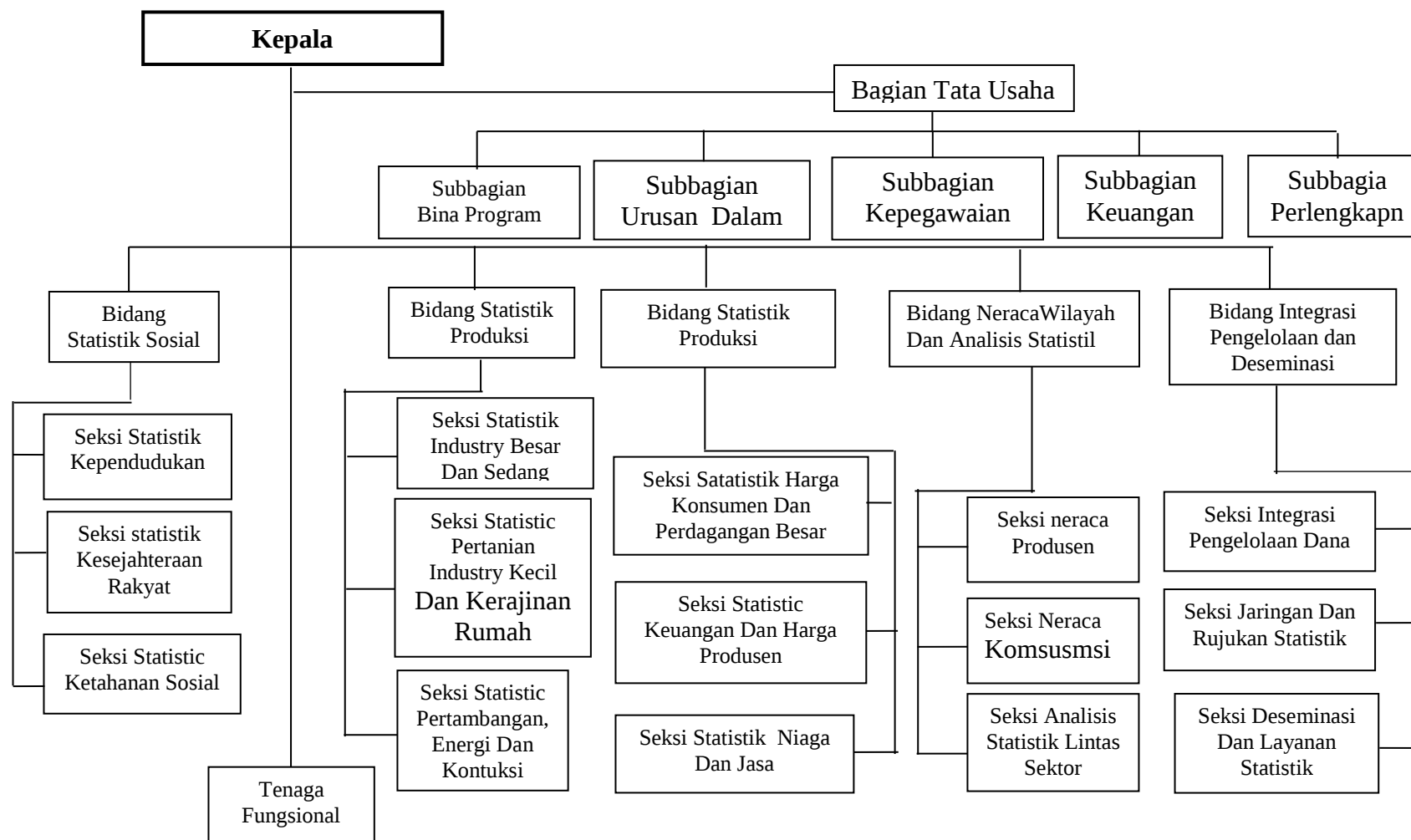
Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No 172/195, KPS diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No.7 1960 ditetapkan bahwa “Badan Pusat Statistik” (BPS), ditugas sebagai penyelenggara Sensus (Pasal 2 UU No.7 tahun 1960).

Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa kemerdekaan RI. Di tiap-tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk. Tahun 1965, dengan Keputusan Predisium Kabinet No.Aa/C/9 Bagian Sensus di tiap kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik.

4. Masa Pemerintahan RI 1966-Sekarang

Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1968,yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di Pusat dan Daerah). Tahun 1980 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1980, tentang organisasi BPS sebagai pengganti PP No.16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap provinsi terhadap kantor statistik dengan nama Kantor Statistik Provinsi dan begitu juga setiap Kabupaten dan Kotamadya terhadap Kantor Statistik dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya.

4.2.3 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT



4.2.4 Visi, Misi dan Nilai-Nilai BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.2.4.1 Visi dan Misi BPS Nusa Tenggara Timur.

Adapun Visi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Kupang ialah sebagai berikut : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Adapun Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Kupang :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4.2.4.2 Nilai- Nilai Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nilai-nilai inti BPS terdiri dari :

1. Profesional

- 1) Komponen

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.

- 2) Efektif

Memberikan hasil maksimal.

- 3) Efisien

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.

- 4) Inovatif

Selalu melakukan pembaruan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.

5) Sistematis

Menyediakan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu dengan yang lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

1) Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.

2) Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Konsisten

Satunya kata dengan perbuatan

4) Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.

5) Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

1) Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.

2) Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.

3) Tulus

Melaksanakan tugas konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.

4) Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

4.2.4.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik.

Adapun tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BPS Provinsi NTT:

- a. Pengajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik.
- b. Pengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional.
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
- d. Penetapan sistem statistik nasional
- e. Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, dan
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BPS Provinsi NTT

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,
 - 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

4.2.4.4 Kegiatan Badan Pusat Statistik

1. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih mudah dan telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980an, personal komputer telah digunakan di

seluruh kantor BPS Provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan data personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang ditetapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efektif positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turun bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit

administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk mengkajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diberikan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entri, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan kealihannya kepada staf BPS daerah.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang diinginkan dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

2. Analisis Data

Analisis terhadap data yang dihasilkan dari sensus dan survei BPS, dilaksanakan oleh Biro Analisis dan Pengembangan. Untuk menghasilkan analisis data yang optimal, BPS juga bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi di Indonesia dan badan-badan Internaional.

Kajian dan analisis data statistik diarahkan untuk dapat memahami dan memberikan perkiraan kuantitatif proyeksi berbagai bidang penting dari pembangunan nasional, untuk keperluan perencanaan, penyusunan kebijaksanaan dan pemantauan. Hasil-hasil analisis tersebut antara lain: Analisis Statistik

Industri Besar/Sedang, Analisis Pertambangan dan Gas Bumi, Analisis Statistik Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Usaha Perusahaan Perikanan Lautan dan Tambak, Analisis Kependudukan, Analisis Fertilitas dan sebagainya.

BPS telah menetapkan status desa miskin berdasarkan PRODES 1990. Dari variabel yang ada diambil beberapa yang berhubungan dengan kemiskinan. Ada tiga kelompok variabel yang digunakan, yaitu: potensi variabel fasilitas desa, fasilitas perumahan dan lingkungan dan variabel keadaan penduduk. Setiap variabel ditentukan nilai skornya berdasarkan tiga kategori, kaya, sedang dan miskin. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan total skor setiap desa. Total skor tersebut digunakan untuk menentukan status tiap desa.